

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Budiarto et al., (2023) & Nurhakiki et al., (2024) membuktikan hasilnya bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan *Sustainability Report*. Dengan melakukan pengawasan berupa *controlling* kegiatan operasional untuk pengungkapan *Sustainability Report* serta didasari dengan teori *stakeholder*, perusahaan yang semakin banyak proporsi anggotanya maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan *Sustainability Report* atas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen.

Sofa et al., (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan OJK No.33/2014 tugas utama dewan komisaris independen sebagai dewan pengawas yang memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi kepentingan pemegang saham serta mengawasi kinerja direksi, terutama dari aspek keuangan. Oleh karena itu, peran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan tingkat keluasan pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang dihasilkan oleh Liana (2019) & Setyawan et al., (2018) juga sejalan, dimana variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sujatnika et al., (2023) memaparkan bahwa ketika anggota komite audit tinggi maka perusahaan akan mendapatkan informasi yang luas sehingga dapat memperkuat kualitas pengungkapan *Sustainability Report*. Variabel komite audit berpengaruh terhadap variabel pengungkapan *Sustainability Report* juga didukung oleh penelitian Wulandari et al., (2021) hasilnya adalah dengan pengawasan yang tinggi dalam keterbukaan atas seluruh aktivitas perusahaan yang telah terlaksana, maka komite audit dapat membantu manajemen untuk mempublikasikan dan melakukan pelaporan keberlanjutan.

Tobing et al., (2019) menyatakan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Ini membuktikan bahwa ukuran atau jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan tidak secara substansial memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, temuan pada penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sofa et al., (2020) membahas tentang pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Sustainability Report* (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel pengungkapan *Sustainability Report*. Hal ini disebabkan karena peran komisaris dan komite audit lebih terfokus pada aspek pengawasan keuangan dan audit, bukan pada pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, pengungkapan laporan keberlanjutan bersifat wajib, sehingga tidak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Sebaliknya, variabel dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel pengungkapan laporan keberlanjutan, di mana frekuensi rapat direksi meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, serta perusahaan besar cenderung mengungkapkan laporan keberlanjutan lebih luas karena kompleksitas aktivitas dan keterlibatan dengan banyak *stakeholder*.

Sujatnika et al., (2023) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 dengan memperoleh 30 sampel. Selain itu, hasil penelitian oleh

Putra et al., (2023) juga dengan hasil yang sama yaitu perusahaan berskala besar yang memiliki jumlah aset yang signifikan, aktivitas operasional yang kompleks, serta keterlibatan dengan berbagai pihak *stakeholder*, cenderung menyampaikan informasi keberlanjutan secara lebih luas.

Saputri et al., (2022) menggunakan SPSS 23 untuk menguji hubungan antara *Sustainability Report* dengan komite audit dan ukuran perusahaan yang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Penelitian ini menemukan bahwa hanya variabel komite audit yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Reprort*. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin banyak pula informasi penting yang dapat diberikan kepada dewan komisaris terkait keberlanjutan. Sebaliknya, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh, karena besarnya aset tidak menjamin perusahaan mampu mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lengkap dan sesuai standar.

Dewi (2019) menghasilkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penungkapan laporan keberlanjutan. Dimana perusahaan dengan skala besar cenderung membatasi penyampaian informasi yang memiliki nilai relevansi tinggi, dengan tujuan menghindari potensi peningkatan beban pajak serta tekanan untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, manajemen perusahaan lebih memilih untuk menyampaikan informasi keberlanjutan secara terbatas atau hanya sebatas yang dianggap perlu.

2.2 Tinjauan Pustaka

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi yang dicetuskan oleh Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa organisasi memiliki upaya untuk memastikan kegiatannya dipandang sesuai dengan sistem nilai masyarakat tempat organisasi tersebut beroperasi.

Teori legitimasi digunakan sebagai dasar teori dalam praktik *Sustainability Report* untuk perkembangan perusahaan tiap periode (satu tahun sekali). Teori ini menyatakan bahwa adanya pembuktian yang dapat diakui dan diterima oleh masyarakat atas hak dan wewenangnya. Pembuktian tersebut diungkapkan dengan bentuk *Sustainability Report* yang berisikan pertanggungjawaban perusahaan atas kesadaran penuh akan hal risiko yang besar terhadap lingkungan sosial.

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Ulum et al., (2021) teori ini bergantung pada dasar ‘kontrak sosial’ yaitu suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya yang dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pengakuan dalam menunjukkan kapasitas *Intellectual Capital* (IC) didalam laporan keuangan perusahaan, menjadi hal penting yang tujuannya untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini menghubungkan legitimasi dengan *Sustainability Report* agar dapat membentuk kepercayaan terhadap masyarakat sebagai bukti kepedulian perusahaan, dan dapat mengelola isu-isu baru yang muncul. Selain itu, hubungannya juga berdampak positif terhadap perusahaan dimana mendapatkan legitimasi dan meminimalisir risiko yang dialami oleh perusahaan pada jangka waktu yang cukup panjang.

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris dari pihak luar yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi perseroan, dan anggota dewan komisaris lainnya, yang berjumlah satu orang atau lebih dan diatur dalam anggaran dasar. Sedangkan menurut Pasal 1 (2) jo. Pasal POJK 55/2015,

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK 55/2015 dan POJK 33/2014.

Menurut Budiarto et al., (2023) Komisaris independen memiliki peran penting dalam meningkatkan citra perusahaan dengan memantau dan memastikan perusahaan telah dikelola oleh manajemen dengan baik karena tugas dari komisaris independen adalah mengawasi fungsi manajemen. Selain itu, peran didalam dewan tersebut adalah mengontrol dan memberikan saran atas evaluasi kinerja perusahaan maupun lingkungan kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan *Sustainability Report* di setiap tahunnya. Hal ini harapannya dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran perusahaan dalam beraktivitas tanpa merusak reputasi perusahaan itu sendiri, sehingga tidak ditinggalkan oleh para investor yang sudah memberi kepercayaan terhadap perusahaan.

3. Komite Audit

Menurut Saputri et al., (2022) Semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Komite audit adalah bagian pengendalian internal didalam perusahaan yang bertugas sebagai mengawasi aktivitas perusahaan. Mulai dari laporan keuangan, adanya kesalahan penulisan laporan keuangan (*Fraud*), mengontrol pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap undang-undang serta standar etika yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian terdahulu menurut Budiarto et al., (2023) diartikan bahwa komite audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran

dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah suatu tingkatan ukuran berdasarkan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang mengelola dan mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dipasarkan. Menurut Pradipta et al., (2022) ukuran perusahaan merupakan indeks kekuatan *financial* untuk melihat besar kecilnya suatu perusahaan. Standar organisasi perusahaan juga dinyatakan sebagai penentuan besar kecilnya ukuran maupun daya tampung di dalam perusahaan. Tujuannya sebagai memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan perusahaan yang dimuat dalam aspek struktur organisasi hingga kinerja dan budaya perusahaan. Pada perusahaan besar dianggap memiliki potensi laba yang tinggi, sehingga dapat menarik perhatian para investor. Hal ini dalam pendanaannya perusahaan akan dapat memperoleh sumber dana dengan mudah untuk operasionalnya sehari-hari yang mencakup pembelian bahan baku, gaji karyawan, investasi, pengembangan produk atau layanan baru, membayar tagihan, dan untuk mengatasi jika terjadi penurunan penjualan maupun peningkatan biaya atas perubahan pasar.

5. Sustainability Report

Sustainability Report atau biasa disebut laporan keberlanjutan adalah sebuah praktik pengukuran, pengungkapan aktivitas perusahaan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya (GRI, 2015). Selain itu, didalam laporan ini juga mencakup tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari akibat aktivitas perusahaan atau organisasi.

Risiko yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan tersebut diungkapkan didalam laporan keberlanjutan guna memberikan bukti kepada pihak yang bersangkutan dalam menangani dampaknya. Harapannya dapat menumbuhkan kepercayaan dan menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat serta lingkungannya. Saat ini perusahaan mulai menerapkan teori *triple bottom line* yang artinya kemajuan perusahaan secara berkelanjutan tidak hanya diukur dari kondisi keuangan saja. Namun, didalamnya juga melibatkan tata kelola yang membutuhkan suatu dana atas penanganannya. Adapun daftar GRI standar sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan *Sustainability Report* Berdasarkan GRI Standar

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
1. GRI 102		
Profil Organisasi		
1.	GRI 102-1	Nama Organisasi
2.	GRI 102-2	Kegiatan, Merek, Produk, dan Jasa
3.	GRI 102-3	Lokasi Kantor Pusat
4.	GRI 102-4	Lokasi Operasi
5.	GRI 102-5	Kepemilikan dan Bentuk Hukum
6.	GRI 102-6	Pasar yang Dilayani
7.	GRI 102-7	Skala Organisasi
8.	GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain
9.	GRI 102-9	Rantai pasokan
10.	GRI 102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokan
11.	GRI 102-11	Pendekatan dan prinsip pencegahan
12.	GRI 102-12	Inisiatif eksternal
13.	GRI 102-13	Keanggotaan asosiasi
Strategi		
14.	GRI 102-14	Pernyataan dari pembuatan keputusan
15.	GRI 102-15	Dampak utama, resiko dan piutang
Etika dan Integritas		
16.	GRI 102-16	Nilai, prinsip, standar dan norma pelaku
Tata Kelola		
17.	GRI 102-18	Struktur tata Kelola
Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
18.	GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan
19.	GRI 102-41	Perjanjian perundingan kolektif
20.	GRI 102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan
21.	GRI 102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
		kepentingan
22.	GRI 102-44	Topik utama dan masalah di kemukakan
Praktik Pelaporan		
23.	GRI 102-45	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keuangan konsolidasi
24.	GRI 102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik
25.	GRI 102-47	Daftar topik material
26.	GRI 102-48	Penyajian Kembali Informasi
27.	GRI 102-49	Perubahan dalam pelaporan
28.	GRI 102-50	periode pelaporan
29.	GRI 102-51	Tanggal laporan terbaru
30.	GRI 102-52	Siklus pelaporan
31.	GRI 102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan
32.	GRI 102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI
33.	GRI 102-55	Indeks isi GRI
34.	GRI 102-56	Assurance dari pihak eksternal
2. GRI 103		
Pendekatan Manajemen		
1.	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan batasannya
2.	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya
3.	GRI 103-3	Evaluasi pendekatan manajemen
3. GRI 200		
Performa Ekonomi		
1.	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang distribusikan
2.	GRI 201-2	Impikasi finansial serta resiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
3.	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4.	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah
Keberadaan Pasar		
5.	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan entry level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
6.	GRI 202-2	proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7.	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
8.	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan		
9.	GRI 204-1	Propordi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi		
10.	GRI 205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki resiko terkait korupsi
11.	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan prosedur anti-korupsi
12.	GRI 205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
Perilaku Anti Persaingan		
13.	GRI 206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trut dan monopoli
4. GRI 300		
Material		
1.	GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
2.	GRI 301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
3.	GRI 301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
Energi		
4.	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
5.	GRI 302-2	Konsumsi energi diluar organisasi
6.	GRI 302-3	Integritas energi
7.	GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi
8.	GRI 302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air		
9.	GRI 303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
10.	GRI 303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
11.	GRI 303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali
Keanekaragaman Hayati		
12.	GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
13.	GRI 304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
14.	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
15.	GRI 304-4	Spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi		
16.	GRI 305-1	Emisi GRK (cakupan 1) langsung
17.	GRI 305-2	Emisi GRK (cakupan 2) tidak langsung
18.	GRI 305-3	Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya
19.	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK
20.	GRI 305-5	Pengurangan Emisi GRK
21.	GRI 305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
22.	GRI 305-7	Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya
Air Limbah dan Limbah		
23.	GRI 306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
24.	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
25.	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan
26.	GRI 306-4	Pengangkutan limbah berbahaya.
27.	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
		limpahan air
Kepatuhan Lingkungan		
28.	GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Penilaian Lingkungan Pemasok		
29.	GRI 308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria Lingkungan
30.	GRI 308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
5. GRI 400		
Kepegawaian		
1.	GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
2.	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau cuti paruh waktu
3.	GRI 401-3	Cuti melahirkan
Hubungan Tenaga Kerja atau Manajemen		
4.	GRI 402-1	Periode pemberitahuan terkait perubahan operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
5.	GRI 403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen- pekerja untuk kesehatan dan keselamatan
6.	GRI 403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan
7.	GRI 403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
8.	GRI 403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan Pendidikan		
9.	GRI 404-1	Rata-rata pelatihan per tahun per karyawan
10.	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
11.	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Kerja		
12.	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
13.	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki
Non Diskriminasi		
14.	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan dan Dilakukan
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif		
15.	GRI 407-1	Operasi dari pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
		berisiko
Pekerja Anak		
16.	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerjaan anak
Kerja Paksa atau Wajib Kerja		
17.	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
Praktik Keamanan		
18.	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-hak Masyarakat Adat		
19.	GRI 411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian Hak Asasi Manusia		
20.	GRI 412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
21.	GRI 412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
22.	GRI 412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal		
23.	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
24.	GRI 413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian Sosial Pemasok		
25.	GRI 414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria Sosial
26.	GRI 414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik		
27.	GRI 415-1	Kontribusi public
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
28.	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kerja dari berbagai kategori produk dan jasa
29.	GRI 416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan Pelabelan		
30.	GRI 417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan Jasa
31.	GRI 417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
32.	GRI 417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi Pemasaran

No.	Pengungkapan GRI	Deskripsi Pengungkapan
Privasi Pelanggan		
33.	GRI 418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan Ekonomi		
34.	GRI 419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dibidang sosial dan ekonomi

Sumber: Oleh GRI Standar 2016 & 2021

2.3 Pengembangan Hipotesis

a.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Teori yang mendukung hubungan variabel Dewan Komisaris Independen terhadap variabel pengungkapan *Sustainability Report* adalah Teori Legitimasi. Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat yang menjadi pilar utama dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan, perusahaan dituntut memperoleh dukungan dan penerimaan dai publik. Dalam kerangka ini, variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai strategis, karena berperan dalam setiap kebijakan perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan publik serta para *stakeholder*, bukan semata-mata kepentingan internal. Dewan Komisaris Independen juga menjalankan fungsi sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang berkontribusi dalam membangun citra positif perusahaan dan mempertahankan legitimasi sosial di mata masyarakat.

Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat memperkuat mekanisme pengawasan, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja operasional dan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi perusahaan akan dipandang lebih aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan melalui alokasi dana

yang optimal, yang kemudian diungkapkan dalam *Sustainability Report* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Pengungkapan ini berkontribusi dalam membangun citra positif perusahaan di mata investor. Sebaliknya, rendahnya jumlah anggota dewan komisaris independen dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap isu keberlanjutan, sehingga *Sustainability Report* cenderung hanya sebagai formalitas dan dapat menurunkan persepsi investor terhadap komitmen keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Budiarto et al., (2023) Nurhakiki et al., (2024) serta Dewi & Ramantha (2021) Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report* yang secara berurutan penelitian dilakukan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020, seluruh perusahaan LQ45 yang terdapat pada BEI tahun 2018-2022, dan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Dengan demikian dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Sustainability Report

a.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Puspitaningrum dan Indriani (2021) memaparkan teori legitimasi menjelaskan bahwa menekankan pentingnya perusahaan untuk membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, guna memperoleh pengakuan serta dukungan sosial. Dalam kaitannya, Komite Audit berperan penting sebagai bagian mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas memastikan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan atas pelaporan dan manajemen risiko, Komite Audit berkontribusi

menjaga komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti investor, regulator, dan masyarakat luas.

Komite audit berperan penting dalam memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan *stakeholder* dan pembentukan citra positif perusahaan. Citra positif ini dapat menarik minat investor, meningkatkan perolehan modal, dan mendorong profitabilitas. Dalam kondisi profitabilitas yang tinggi, perusahaan memiliki kapasitas finansial untuk mendukung kegiatan sosial dan lingkungan yang kemudian diungkapkan melalui *Sustainability Report*. Keberadaan komite audit yang efektif juga memberikan sinyal positif terhadap reputasi dan legitimasi perusahaan, serta dapat mendorong peningkatan kualitas dan cakupan pengungkapan keberlanjutan yang luas. Sebaliknya, jika komite audit tidak menjalankan perannya secara optimal, maka dapat timbul praktik *greenwashing* yang merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Sujatnika et al., (2023) Wulandari et al., (2021) Saputri et al., (2022) dan Budiarto et al., (2023) menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap variabel pengungkapan *Sustainability Report*.

Dengan demikian dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Sustainability Report*

a.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Ukuran perusahaan mencerminkan karakteristik internal yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh sumber daya, menjalin relasi bisnis, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi pasar. Menurut teori legitimasi, perusahaan perlu memastikan bahwa operasinya sesuai dengan nilai, norma,

dan ekspektasi masyarakat agar dapat mempertahankan keberadaannya. Perusahaan yang besar cenderung menghadapi tekanan sosial yang lebih tinggi karena akses publik terhadap informasi yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan lebih terdorong untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan guna mempertahankan legitimasi eksternal (Suchman, 1995).

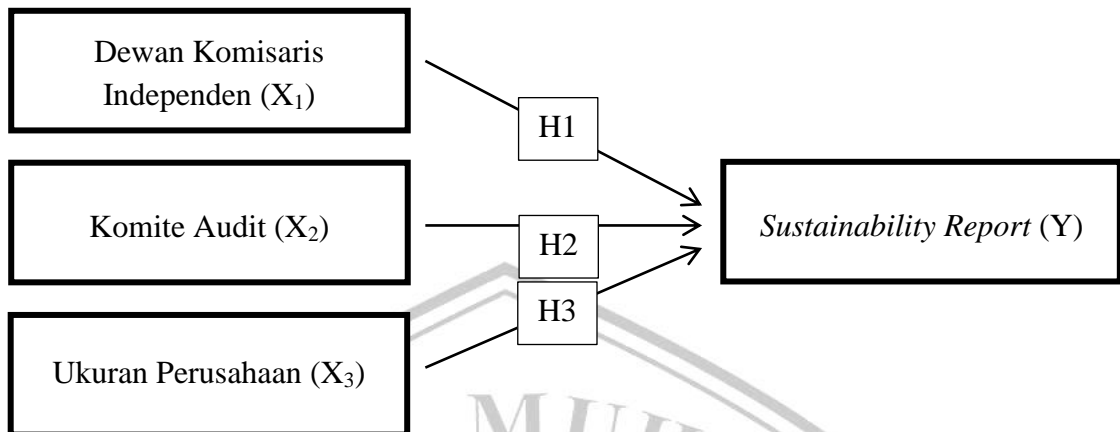
Perusahaan berskala besar umumnya memiliki kapasitas operasional yang tinggi dan aktivitas yang kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih besar. Untuk mempertanggungjawabkan dampak tersebut, perusahaan perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI, yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Meskipun memerlukan alokasi biaya, pengungkapan ini berfungsi sebagai terciptanya sinyal positif bagi publik, memperkuat citra perusahaan, memperoleh legitimasi sosial, serta meminimalkan risiko konflik dengan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sujatnika et al., (2023) Budiarto et al., (2023) dan Putra et al., (2023) menemukan bukti empiris bahwa pada variabel Ukuran Perusahaan ada pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Dengan demikian dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Sustainability Report*

2.4 Kerangka Hipotesis



Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis

Sumber: Oleh Peneliti, 2025

